

Buku ini merangkum lintasan pemikiran hukum, politik, HAM dan kenegaraan dari Suparman Marzuki sejak tahun 2017 hingga 2024. Sumber tulisan berasal dari artikel opini yang terbit di media cetak nasional seperti Kompas dan Tempo dan opini yang disarikan dari siniar/podcast pada kanal YouTube Terus Terang (dikelola Prof. Moh. Mahfud MD) dan kanal YouTube Jogja Network di tahun 2025-2026. Opini yang berasal dari kanal YouTube diolah dan disajikan oleh tim editor agar selaras dengan kolom opini di media cetak.

Terhitung sejak Januari 2026, Suparman Marzuki atau Bang SM meraih jabatan akademik tertinggi Guru Besar bidang Hukum HAM. Jejak pikiran kritis dan tulisannya tersebar luas sejak tahun 1984 (saat masih menjadi mahasiswa Strata 1), baik di media cetak lokal, regional, maupun nasional. Artinya, keterlibatan Suparman, dalam meramu dan menawarkan ide hukum kritis lewat tulisan populer sudah berlangsung lama, setidaknya selama 46 tahun. Buku ini adalah ikhtiar kecil merekam dan menyajikan ulang puluhan opini yang berhasil dikumpulkan, yang memotret kiprah intelektual Suparman dalam merespon dinamika kenegaraan pada masanya.



Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. lahir 2 Maret 1961 adalah mantan Ketua Komisi Yudisial periode tahun 2013-2015. Aktivistik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.H. Pria kelahiran Lampung pada tanggal 2 Maret 1961 tercatat aktif dalam berbagai kegiatan kampus dan pada akhirnya mengabdikan sebagai dosen di almamaternya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII).

Selain dosen, ia pernah menduduki jabatan sebagai Ketua KPU Provinsi DIY periode tahun 2003-2008, Direktur PUSHAM-UII sejak tahun 2000 hingga 30 Juni 2010, dan Komisioner Komisi Yudisial RI tahun 2010-2015. Saat ini, Suparman Marzuki mendapatkan amanah selaku ketua umum Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia masa jabatan 2023-2028.



PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA



PUSAT STUDI
AGAMA & DEMOKRASI



PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA



PUSAT STUDI
AGAMA & DEMOKRASI

Politik Hukum dan Integritas Kenegaraan: Pemikiran Suparman Marzuki

POLITIK HUKUM — DAN — INTEGRITAS KENEGARAAN

Pemikiran Suparman Marzuki



AKSI KAMISAN

Penulis:
Suparman Marzuki

Editor:
Despan Heryansyah & Masduki

POLITIK HUKUM DAN INTEGRITAS KENEGARAAN:

Pemikiran Suparman Marzuki

Penulis: Suparman Marzuki

Editor:Despan Heryansyah dan Masduki



PUSAT STUDI
HAK ASASI MANUSIA

POLITIK HUKUM DAN INTEGRITAS KENEGARAAN:
Pemikiran Suparman Marzuki

Suparman Marzuki (Penulis)
Despan Heryansyah dan Masduki (Editor)

15 cm x 23 cm
viii+ 180 hal
ISBN:

Desain Sampul: Deny
Tata Letak : Abrar
Cetakan Pertama: Maret 2026

Penerbit:
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
(PUSHAM UII) Yogyakarta.
Jeruk Legi RT. 13/RW. 35 Gg. Bakung No. 517 A,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
Telp./fax. (0274) 452032/452158
Email: pushamuii@yahoo.com
Website: www.pusham.uii.ac.id

Buku ini diterbitkan atas kerjasama Pusat Studi Agama dan Demokrasi
(PSAD) Universitas Islam Indonesia dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Islam Indonesia (Pusham UII)

Pengantar Editor

Buku ini adalah persembahan peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) Universitas Islam Indonesia dalam rangka pencapaian gelar akademik tertinggi, Guru Besar, Prof. Dr. Suparman Marzuki, SH., M.Si. Kami memaknai buku ini, selain sebagai bentuk penghormatan terhadap Prof. Suparman (begitu panggilan barunya) karena turut membidani lahirnya PSAD UII, terutama memberikan dan menanamkan kerangka program organisasi, juga sebagai bentuk kesadaran akademik untuk merawat ide-ide otentik seorang tokoh bangsa atas berbagai isu kenegaraan yang aktual pada masanya. Dalam proses pencarian tulisan, editor menemukan jejak tulisan Prof. Suparman sejak tahun 1984 (saat masih menjadi mahasiswa Strata 1), baik di media cetak lokal, regional, maupun nasional. Artinya, keterlibatan Prof. Suparman, dalam menggagas ide melalui tulisan populer, sudah berlangsung setidaknya selama 46 tahun. Dalam fase itu, memang ada jeda yang cukup panjang, saat Prof. Suparman mendapatkan amanah negara baik sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum, maupun ketua Komisi Yudisial hingga tahun 2017. Belakangan, setidaknya sejak tahun 2025 hingga saat ini, karena pergeseran platform penyampaian opini semakin banyak dilakukan melalui kanal youtube, Prof. Suparman juga banyak menghiasi podcast-podcast di beberapa kanal media youtube.

Oleh karena itu, atas pertimbangan relevansi sumber utama tulisan dalam buku ini adalah opini yang diterbitkan Prof. Suparman sejak tahun 2017 hingga 2024, yang kebetulan semuanya diterbitkan oleh media cetak Kompas dan Tempo,

serta opini yang disarikan dari podcast Prof. Suparman di kanal youtube Terus Terang Prof. Moh. Mahfud MD dan kanah youtube Jogja Network. Opini yang berasal dari kanal youtube di olah dan disajikan oleh tim editor agar menyesuaikan dengan kolom yang berasal dari media cetak. Tentu saja ini bukan pekerjaan yang sulit karena seluruh kanal youtube Prof. Suparman selalu mengandung pemikiran tajam, kritis, dan orisinil, sehingga pekerjaan editor sejatinya hanya menyusun secara tematik saja.

Ucapan terima kasih, editor haturkan kepada MMD Initiative yang telah menyediakan sumber dayanya sehingga buku ini dapat sampai di tangan pembaca yang budiman. Ucapan serupa juga kepada tim PSAD UII yang dalam waktu sangat singkat dapat mengumpulkan semua tulisan dan mentranskrip puluhan kanal youtube Prof. Suparman. Akhirnya, sebagai kumpulan tulisan, tentu saja terdapat banyak kelemahan dalam buku ini, terutama dalam penempatan tema-tema spesifik. Selamat Prof. Suparman Marzuki, semoga gelar baru yang disanding semakin menguatkan komitmen untuk terus menyuarkan ketidakadilan dan kebenaran. Kami semua menunggu karya dan pemikiran berikutnya. Buku ini adalah pengingat seperti yang selalu engkau sampaikan, bahwa jalan perjuangan masih sangat panjang.

Yogyakarta, 28 Februari 2026

Editor

DAFTAR ISI

Sambutan.....	iii
Daftar Isi	v
BAB 1 POLITIK HUKUM KENEGARAAN.....	1
1. Penegakan Hukum Penuh Aib dan Drama	2
2. Negara Tidak Hadir	6
3. Negara Peraturan.....	9
4. Birokrasi dan Prosedur Peradilan	13
5. Presiden, DPR, dan MA Menunggu Apa Lagi	17
6. Ketajaman Penegakan Hukum	21
7. Angka Gelap Korupsi	25
8. Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu	30
9. Diskriminasi Penegakan Hukum	35
10. Ancaman terhadap Kebebasan Berpendapat	40
11. Perekrutan Hakim yang Baik.....	44
12. Crime Hunter Vs Polisi Sipil	49
BAB II INTEGRITAS BERNEGARA.....	53
1. Seharusnya Ketua Mahkamah Konstitusi Mundur.....	54
2. Memudarnya Integritas dan Etika Penegak Hukum.....	57
3. Konflik Kepentingan dan Etika Penegakan Hukum.....	62

4. Sudah Dua Kali, Lalu Bagaimana?	66
5. Independensi dan Imparsialitas Hakim	70
6. Pengkhianatan pada Profesi.....	74
7. Darurat MK: Dari Benteng Konstitusi Jadi Boneka Politik?	79
8. MK Legalkan Nepotisme	85
9. Ketua MK Langgar Imparsialitas	91
10. Etika Bernegara, Krisis Integritas, dan Tantangan Reformasi Sistem Hukum Indonesia.....	96
11. Baru Jadi Menteri Sudah Lupa Diri	102
12. Hilangnya Integritas	108
13. Anomali Advokat	113

BAB III POTRET NEGARA HUKUM DAN

DEMOKRASI 119

1. Hakim Miskin, Hukum Bobrok: Tentang Negara Berbenah.....	120
2. Peradilan Sesat, Dari Sum Kuning Sampai Vina...126	
3. Saksi Ahli VS Ahli Bersaksi PraPeradilan Tom Lembong.....	131
4. Kejar Koruptor Hingga Antartika.....	137
5. Anomali Pilkada 2024	141
6. Jokowi: Janji vs Tindakan.....	144
7. Indonesia Mau Kemana?	149
8. Indonesia Sedang Menghadapi Krisis Lebih Buruk dari 98	153

9. RUU Pilkada: Demi Dinasti Kudeta Konstitusi	158
10. Peradilan Tidak Adil, Kekuasaan Makin Sentralistik	163
11. Siapa Biang Kerok Kerusuhan	166
12. Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM sebagai Hutang Kemanusiaan Negara.....	172
13. Ancaman Pembatasan Ruang Digital dan Hutang Demokrasi terhadap Generasi Muda	176

